



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANIEL H. P. PANGGABEAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
3. NHK : 131555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 761 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 1.945 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 742 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.740.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, ISUZU TBR 541 LM 25 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 63.240.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.540.945

F. HARTA LAINNYA Rp. 39.125.086



Sub Total	Rp.	1.991.406.031
III. HUTANG	Rp.	322.569.040
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.668.836.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.